



Peranan UPTD Dinas Sosial Provsu Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (LANSIA) Terlantar Di Kota Binjai

Peranan UPTD Dinas Sosial Provsu Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (LANSIA) Terlantar Di Kota Binjai

Frastito, Agung Suharyanto* & Marlina Deliana

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Medan Area, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Provsu) dalam meningkatkan kesejahteraan lanjut usia (lansia) terlantar di Kota Binjai. Lansia terlantar merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus karena tidak memiliki dukungan keluarga, tempat tinggal, maupun penghasilan tetap. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan terdiri dari petugas UPTD, lansia penerima layanan, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD Dinas Sosial Provsu telah menjalankan berbagai program seperti penyediaan panti sosial, bantuan kebutuhan pokok, pelayanan kesehatan, pembinaan sosial dan psikologis, serta pemberdayaan lansia. Program ini secara umum dinilai efektif dalam meningkatkan kualitas hidup lansia, namun masih dihadapkan pada sejumlah kendala seperti keterbatasan anggaran, fasilitas yang belum memadai, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran, penguatan kerja sama lintas sektor, pemanfaatan teknologi informasi, serta kampanye edukatif sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas program dan menciptakan sistem perlindungan sosial lansia yang lebih berkelanjutan.

Keywords: Kesejahteraan; Lansia Terlantar; UPTD Dinas Sosial; Kota Binjai; Perlindungan Sosial.

Abstract

This study aims to examine the role of the Regional Technical Implementation Unit (UPTD) of the North Sumatra Provincial Social Service (Provsu) in improving the welfare of the abandoned elderly in Binjai City. The abandoned elderly are a vulnerable group that needs special attention because they do not have family support, housing, or a fixed income. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, observations, and documentation. The informants consisted of UPTD officers, elderly service recipients, and community leaders. The results of the study show that the UPTD of the Provsu Social Service has carried out various programs such as the provision of social institutions, basic needs assistance, health services, social and psychological coaching, and empowerment of the elderly. This program is generally considered effective in improving the quality of life of the elderly, but it is still faced with many obstacles such as budget limitations, inadequate facilities, and low public awareness. This study recommends increasing budget allocation, strengthening cross-sector cooperation, utilizing information technology, and educational campaigns as strategic steps to increase program effectiveness and create a more sustainable social protection system for the elderly.

Keywords: Welfare; Neglected Elderly; UPTD Social Services; Binjai City; Social Protection.

How to Cite: Frastito, Suharyanto, A., & Deliana, M. (2025). Peranan UPTD Dinas Sosial Provsu Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (LANSIA) Terlantar Di Kota Binjai. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 7(2): 158-164

*Corresponding Email: agungsuharyanto@uma.ac.id

ISSN 2722-1148 (Online)



PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu pilar penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, terutama dalam menjamin perlindungan terhadap kelompok rentan seperti lanjut usia (lansia) (Maksuk & Yusneli Y., 2021; Saragih & others, 2018a). Lansia merupakan bagian dari masyarakat yang secara alami mengalami penurunan kemampuan fisik, mental, maupun sosial, sehingga membutuhkan perhatian khusus dari negara dan masyarakat (Achmad, 2022; Nurrahmadhani & others, 2018a). Dalam konteks tertentu, terdapat kelompok lansia yang termasuk dalam kategori lansia terlantar, yaitu individu yang telah memasuki usia lanjut namun tidak memiliki dukungan keluarga, tempat tinggal yang layak, atau sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mereka rentan mengalami pengabaian, kesepian, kelaparan, bahkan kekerasan, yang dapat memperburuk kualitas hidup di masa tua (Hutauruk, 2010; Iranita, 2022).

Di Indonesia, permasalahan lansia terlantar menjadi isu sosial yang semakin kompleks, termasuk di tingkat daerah seperti Kota Binjai, Provinsi Sumatera Utara. Kota ini menunjukkan tren peningkatan jumlah lansia terlantar dari tahun ke tahun. Fenomena ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, antara lain meningkatnya angka kemiskinan, perubahan struktur keluarga dari keluarga besar menjadi keluarga inti, urbanisasi, dan lemahnya sistem perlindungan sosial yang inklusif bagi lansia (Nurrahmadhani & others, 2018b; Saragih & others, 2018b). Selain itu, keterbatasan akses terhadap pelayanan kesehatan, fasilitas sosial, dan bantuan ekonomi turut memperburuk situasi kelompok lansia terlantar. Keadaan ini menunjukkan bahwa masih banyak lansia yang belum mendapatkan jaminan hidup layak, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia (Yulianto, 2021).

Kondisi tersebut menuntut peran aktif pemerintah daerah dalam menjawab persoalan kesejahteraan lansia terlantar. Pemerintah, melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Provsu), bertanggung jawab melaksanakan pelayanan sosial secara langsung kepada kelompok rentan, termasuk lansia yang tidak memiliki dukungan keluarga maupun tempat tinggal tetap (ANDIKA & others, 2020; FITRI & others, 2013). UPTD Dinas Sosial menjadi pelaksana teknis dari berbagai kebijakan dan program sosial yang dirancang oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Bentuk pelayanan yang diberikan kepada lansia terlantar mencakup bantuan sosial reguler, layanan konsultasi sosial, pelayanan kesehatan dasar, pengasuhan di panti sosial, hingga pembinaan kemandirian hidup. Pelayanan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup lansia, memberikan rasa aman, dan mengurangi beban hidup mereka di masa tua (Syurandhari et al., 2015; Yuliati, 2014).

Namun, meskipun program-program tersebut telah dilaksanakan, efektivitas implementasi di lapangan masih perlu ditinjau lebih lanjut. Tidak semua lansia terlantar mampu terjangkau oleh program pelayanan yang disediakan, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, maupun mekanisme pelayanan yang belum optimal (Damanik, 2024; Djuari et al., 2025). Beberapa laporan menyebutkan masih ada lansia terlantar yang belum mendapatkan perhatian, mengalami diskriminasi sosial, serta hidup dalam kondisi yang memprihatinkan. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi bagaimana UPTD Dinas Sosial Provsu menjalankan perannya di Kota Binjai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial lansia terlantar secara nyata.

Penelitian sebelumnya telah mengungkap sejumlah temuan terkait penanganan lansia terlantar di Indonesia. Rahmawati (2020) misalnya, dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan bantuan sosial bagi lansia terlantar masih menghadapi tantangan serius, terutama dari sisi terbatasnya anggaran dan minimnya jumlah tenaga pendamping sosial yang kompeten di lapangan. Hal ini berdampak pada rendahnya intensitas kunjungan dan pendampingan kepada lansia yang berada di luar panti. Sementara itu, penelitian oleh Suryadi (2021) menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya dalam mewujudkan layanan sosial yang merata dan berkelanjutan. Suryani menegaskan bahwa pemberdayaan komunitas lokal dapat menjadi strategi alternatif yang efektif dalam menjangkau lansia yang tidak terakomodasi oleh program formal pemerintah.

Temuan-temuan tersebut memberikan gambaran bahwa masih terdapat celah dalam sistem pelayanan sosial bagi lansia terlantar, baik dari aspek struktural maupun teknis. Salah satu kesenjangan yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam adalah bagaimana pelaksanaan

peran UPTD Dinas Sosial Provsu di tingkat kota/kabupaten, khususnya di Kota Binjai yang memiliki karakteristik sosial dan geografis tersendiri. Penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan program, tantangan yang dihadapi, serta strategi yang digunakan oleh petugas lapangan dalam menjangkau lansia menjadi penting untuk memberikan masukan terhadap perbaikan sistem pelayanan sosial yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan penerima manfaat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peranan UPTD Dinas Sosial Provsu dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar di Kota Binjai. Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis sejauh mana program yang dilaksanakan dapat menjawab kebutuhan dasar lansia, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh petugas sosial dalam proses implementasi program. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali strategi alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan sosial bagi lansia terlantar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai peranan UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Provsu) dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar di Kota Binjai. Pendekatan ini dipilih karena dinilai mampu menggali dinamika sosial dan praktik pelayanan yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari hingga Maret 2024 dan berfokus pada UPTD Dinas Sosial Provsu yang beroperasi di Kota Binjai, termasuk lokasi-lokasi pembinaan dan penampungan lansia seperti panti sosial atau rumah singgah yang dikelola oleh instansi terkait.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima informan kunci, yakni dua orang pejabat atau petugas UPTD Dinas Sosial Provsu yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, dua orang lansia terlantar penerima layanan, serta satu tokoh masyarakat atau relawan sosial yang turut mendampingi proses pembinaan. Informan dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam program kesejahteraan sosial. Selain wawancara, dilakukan pula observasi langsung terhadap kegiatan pelayanan, fasilitas, serta interaksi antara petugas dan lansia. Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi laporan tahunan Dinas Sosial, kebijakan perlindungan lansia, serta literatur ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan model interaktif dari Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi dilakukan dengan menyeleksi dan merangkum data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi agar fokus pada aspek yang relevan. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel agar mudah dianalisis secara tematik. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memadukan hasil dari berbagai sumber, serta menerapkan teknik triangulasi data, yaitu membandingkan hasil wawancara petugas dengan dokumen kegiatan dan pengamatan langsung, guna memastikan keabsahan dan validitas informasi yang diperoleh. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas dan tantangan dalam implementasi program kesejahteraan lansia terlantar di Kota Binjai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan UPTD Dinas Sosial Provsu Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (LANSIA) Terlantar Di Kota Binjai

Lansia merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perhatian khusus dalam sistem kesejahteraan sosial, terutama mereka yang berada dalam kondisi terlantar. Hak-hak lansia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, menegaskan bahwa setiap lansia berhak memperoleh perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, serta kesempatan untuk tetap berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam kerangka perlindungan sosial menurut Midgley (2012), negara berkewajiban menyediakan jaring pengaman sosial, termasuk bagi lansia yang tidak memiliki penopang ekonomi dan sosial. UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Provsu) yang beroperasi di Kota Binjai memainkan peran penting dalam menjamin terpenuhinya hak-hak tersebut melalui serangkaian program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang terarah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia menjadi dasar hukum penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia (lansia) secara berkelanjutan. Undang-undang ini menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak-hak lansia agar mereka tetap hidup sejahtera, bermartabat, serta berperan dalam kehidupan sosial. Sejalan dengan amanat tersebut, UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Provsu) yang berada di Kota Binjai melaksanakan berbagai program kesejahteraan sosial khususnya bagi lansia terlantar. Program-program tersebut mencakup penyediaan panti sosial, bantuan kebutuhan pokok, layanan kesehatan rutin, pembinaan psikologis, hingga pelatihan keterampilan untuk menunjang kemandirian lansia. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, program ini telah menyentuh aspek-aspek penting dalam peningkatan kualitas hidup lansia, khususnya mereka yang tidak memiliki tempat tinggal tetap maupun dukungan keluarga. Seorang petugas UPTD menyampaikan bahwa mayoritas lansia yang ditangani merupakan individu yang telah kehilangan seluruh jaringan keluarga dan tidak memiliki tempat bergantung. Oleh karena itu, mereka diasramakan di panti sosial dan menerima layanan menyeluruh seperti makanan bergizi, tempat tidur yang layak, serta perawatan kesehatan yang dilakukan secara berkala. Layanan ini bertujuan untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar lansia sekaligus mendukung proses rehabilitasi sosial. Prinsip rehabilitasi sosial menekankan pentingnya pemulihan fungsi sosial individu agar tetap merasa berharga, memiliki makna hidup, serta mampu menjalani hari tua secara layak. Dengan demikian, kehadiran UPTD Dinas Sosial Provsu di Kota Binjai tidak hanya menjalankan amanat undang-undang, tetapi juga menjadi wujud nyata kepedulian negara terhadap kelompok rentan lansia.

Kondisi lansia terlantar di Kota Binjai menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data UPTD, mayoritas lansia yang terlantar disebabkan oleh tiga faktor utama, yakni kemiskinan, kurangnya dukungan keluarga, serta masalah kesehatan yang menghambat kemandirian. Seorang lansia penerima layanan di panti mengungkapkan bahwa dirinya sempat tinggal seorang diri setelah anaknya merantau dan tidak pernah lagi memberikan kabar. Dalam kondisi tersebut, ia akhirnya dijemput dan dibawa ke panti sosial oleh petugas untuk mendapatkan perawatan dan tempat tinggal yang layak. Pengakuan ini memperlihatkan dampak perubahan struktur keluarga yang menyebabkan lansia menjadi terpinggirkan. Dalam teori keluarga oleh Bengtson (2001), ketika dukungan intergenerasional melemah, negara dan masyarakat perlu mengambil alih fungsi proteksi dan perawatan terhadap lansia.

Untuk merespon kondisi tersebut, UPTD Dinas Sosial Provsu telah merancang beberapa program utama yang terbukti membawa dampak positif. Pertama adalah program bantuan sosial, di mana lansia yang berada di panti maupun luar panti memperoleh kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan obat-obatan secara berkala. Program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi simbol kehadiran negara bagi warganya yang terlupakan. Kedua, program pelayanan kesehatan, yang bekerja sama dengan dinas kesehatan untuk memberikan layanan seperti pemeriksaan rutin, penyuluhan gaya hidup sehat, dan distribusi obat-obatan. Salah satu lansia yang tinggal di panti sosial menyampaikan bahwa mereka secara rutin mendapat kunjungan dari tim medis, dan apabila ada yang sakit, penanganan langsung diberikan tanpa harus menunggu lama.

Ketiga, UPTD juga menerapkan program pemberdayaan lansia, terutama bagi mereka yang masih memiliki kemampuan fisik dan kognitif. Kegiatan seperti membuat kerajinan tangan, berkebun, dan membantu operasional dapur panti menjadi bentuk pelibatan aktif lansia agar tetap produktif. Hal ini sejalan dengan pendekatan *active aging* dari WHO, yang menekankan pentingnya partisipasi lansia dalam kegiatan sosial dan ekonomi untuk mempertahankan kualitas hidup. Seorang lansia yang mengikuti program pemberdayaan menyampaikan bahwa ia merasa senang karena diberi kesempatan menanam sayur di halaman panti. Kegiatan tersebut memberinya perasaan bahwa dirinya kembali memiliki peran dan kontribusi yang berarti.

Selain itu, UPTD juga melaksanakan rehabilitasi sosial dan psikologis. Layanan ini bertujuan mengurangi tekanan mental akibat keterlantaran dan kesepian. Lansia diajak untuk berinteraksi dalam kelompok, mengikuti kegiatan rekreasi, serta mendapatkan pendampingan dari tenaga sosial. Pendekatan ini terbukti mampu meningkatkan kebahagiaan dan kepercayaan diri lansia. Seorang lansia yang sebelumnya mengalami depresi ringan menceritakan bahwa dulu ia lebih

sering menghabiskan waktu hanya berdiam diri di kamar, namun sejak mengikuti program rehabilitasi sosial, ia mulai aktif mengikuti senam pagi dan berinteraksi dengan teman-teman di panti.

Upaya terakhir yang sangat penting adalah penyediaan fasilitas penampungan lansia di panti sosial. Panti menjadi tempat perlindungan terakhir bagi lansia yang benar-benar tidak memiliki tempat tinggal dan sanak keluarga. Di panti ini, mereka menerima perawatan menyeluruh dari aspek fisik, psikologis, hingga spiritual. Namun, dari hasil penelitian ditemukan bahwa kapasitas panti masih terbatas dan belum mampu menampung semua lansia terlantar di Kota Binjai. Seorang petugas menjelaskan bahwa dalam beberapa situasi mereka terpaksa menolak lansia yang membutuhkan bantuan karena kapasitas tempat yang tersedia sudah penuh. Ia juga menyampaikan harapan agar ke depan dapat dilakukan penambahan gedung atau fasilitas lain untuk menampung lebih banyak lansia terlantar.

Efektivitas program UPTD Dinas Sosial Provsu dalam meningkatkan kesejahteraan lansia terlantar dapat dilihat dari tiga indikator utama. Pertama, meningkatnya jumlah lansia yang terlayani setiap tahun. Kedua, membaiknya kondisi kesehatan dan psikologis lansia berdasarkan pemantauan petugas. Ketiga, tingginya tingkat kepuasan lansia terhadap layanan yang diterima. Namun demikian, sejumlah tantangan juga masih dihadapi. Di antaranya adalah keterbatasan anggaran, kurangnya jumlah tenaga pendamping sosial, serta minimnya kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab terhadap lansia. Tantangan ini jika tidak ditangani akan menghambat keberlanjutan dan perluasan program.

Setiawan (2022) dalam kajiannya tentang kebijakan perlindungan sosial bagi lansia di Indonesia menekankan bahwa kesuksesan program tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan layanan, tetapi juga oleh sistem yang mampu mengintegrasikan peran pemerintah, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, UPTD Dinas Sosial perlu membangun jaringan kerja sama yang lebih luas, termasuk dengan organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, dan lembaga pendidikan, untuk menciptakan budaya kepedulian terhadap lansia. Kampanye edukatif mengenai hak lansia dan pentingnya solidaritas keluarga juga harus diperkuat.

Upaya Peningkatan Program dan Layanan Kesejahteraan Lanjut Usia (LANSIA) Terlantar Di Kota Binjai

Kesejahteraan lansia merupakan bagian integral dari pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Dalam konteks Kota Binjai, kelompok lansia terlantar masih menjadi salah satu isu sosial yang membutuhkan perhatian serius. Lansia terlantar, yaitu mereka yang tidak memiliki dukungan keluarga, tempat tinggal, maupun penghasilan tetap, kerap kali hidup dalam kondisi rentan secara fisik, psikologis, dan sosial. Pemerintah melalui UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara (Provsu) telah melaksanakan berbagai program untuk menjawab permasalahan ini. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun program tersebut sudah berjalan dan membawa dampak positif, masih banyak ruang untuk peningkatan dan pengembangan.

Salah satu aspek penting yang perlu diperkuat adalah penganggaran. Berdasarkan temuan penelitian, keterbatasan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi program pelayanan bagi lansia terlantar. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesejahteraan lansia memerlukan penambahan alokasi anggaran secara signifikan. Penambahan ini dapat digunakan untuk memperluas cakupan penerima manfaat, menambah jumlah tenaga pendamping sosial, memperbaiki fasilitas panti sosial, dan menyelenggarakan program-program pemberdayaan lansia yang berkelanjutan. Anggaran yang memadai juga memungkinkan adanya pelatihan khusus bagi petugas lapangan agar pelayanan yang diberikan lebih profesional dan empatik.

Selain penguatan anggaran, peningkatan kesejahteraan lansia juga membutuhkan sinergi yang lebih baik antara UPTD Dinas Sosial Provsu dengan pemerintah daerah dan sektor swasta. Koordinasi antarlembaga sangat penting untuk menciptakan sistem pelayanan sosial yang terintegrasi. Pemerintah kota, dinas kesehatan, lembaga keagamaan, dan perusahaan lokal dapat dilibatkan dalam bentuk program CSR (Corporate Social Responsibility), kampanye sosial, serta dukungan logistik dan infrastruktur. Dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, beban kerja UPTD dapat didistribusikan dan jangkauan program dapat diperluas secara signifikan.

Bentuk kolaborasi ini sejalan dengan pendekatan pembangunan partisipatif yang menekankan keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi masalah sosial.

Upaya peningkatan juga harus menyentuh aspek pencegahan. Dalam hal ini, sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah penting yang tidak bisa diabaikan. Kurangnya kesadaran keluarga mengenai pentingnya merawat lansia merupakan salah satu penyebab utama keterlantaran. Oleh karena itu, UPTD perlu mengembangkan program edukasi dan kampanye yang menasar keluarga, RT/RW, dan komunitas lokal. Media sosial, brosur, penyuluhan tatap muka, serta kerja sama dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat digunakan sebagai sarana untuk menyebarluaskan nilai-nilai kepedulian terhadap lansia. Melalui peningkatan kesadaran kolektif, diharapkan masyarakat mampu menjadi barisan pertama dalam mencegah terjadinya keterlantaran lansia.

Peningkatan kualitas fasilitas panti sosial juga menjadi prioritas penting. Saat ini, jumlah panti sosial di Kota Binjai yang dikelola oleh UPTD masih terbatas, dan beberapa di antaranya mengalami keterbatasan dalam hal kapasitas, kenyamanan, serta sumber daya manusia. Pembinaan fasilitas panti tidak hanya mencakup perbaikan infrastruktur fisik seperti kamar tidur, ruang makan, dan fasilitas kesehatan, tetapi juga pengembangan program pendampingan sosial dan psikologis. Lansia yang tinggal di panti tidak hanya membutuhkan perawatan fisik, tetapi juga butuh dukungan emosional agar mereka merasa dihargai dan tetap memiliki makna dalam kehidupan sosial mereka. Pelatihan bagi petugas panti untuk memahami pendekatan lansia yang humanistik dan ramah usia juga menjadi bagian dari peningkatan layanan.

Di era digital, penggunaan teknologi informasi menjadi elemen penting dalam pengelolaan layanan sosial. UPTD Dinas Sosial Provsu di Kota Binjai disarankan untuk mengembangkan sistem database digital yang terintegrasi, yang berisi profil lengkap lansia terlantar, riwayat bantuan, status kesehatan, dan kebutuhan khusus masing-masing individu. Sistem ini akan memudahkan dalam melakukan pemetaan, analisis kebutuhan, serta memastikan distribusi bantuan dilakukan secara tepat sasaran. Selain itu, sistem ini juga dapat diakses oleh lembaga terkait untuk mendorong koordinasi lintas sektor yang lebih efisien. Pemanfaatan teknologi akan mempercepat proses layanan, menghindari tumpang tindih data, dan memberikan transparansi kepada publik.

Rekomendasi lain yang dapat dilakukan adalah pengembangan program pemberdayaan lansia yang lebih kreatif dan berkelanjutan. Lansia yang masih sehat secara fisik dan mental dapat dilibatkan dalam kegiatan ekonomi produktif ringan, pelatihan keterampilan, atau kegiatan sosial yang memberi kontribusi nyata bagi komunitas. Program ini selain memperkuat rasa percaya diri lansia, juga mengurangi ketergantungan mereka terhadap bantuan pemerintah. Kegiatan seperti pelatihan kerajinan tangan, berkebun, atau menjadi narasumber dalam kegiatan masyarakat bisa menjadi pilihan yang mendorong lansia untuk tetap aktif.

Terakhir, diperlukan sistem monitoring dan evaluasi yang konsisten dan komprehensif. Setiap program dan layanan yang dijalankan UPTD Dinas Sosial Provsu perlu dievaluasi secara berkala untuk melihat efektivitas, kendala yang dihadapi, serta potensi perbaikan. Monitoring tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga dapat melibatkan pihak ketiga seperti akademisi, LSM, atau tokoh masyarakat agar proses evaluasi bersifat objektif dan partisipatif. Hasil evaluasi dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan sosial berikutnya dan memastikan program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan riil lansia terlantar di Kota Binjai.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara di Kota Binjai telah menjalankan peranan penting dalam peningkatan kesejahteraan lansia terlantar melalui berbagai program yang mencakup bantuan sosial, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemberdayaan lansia. Program-program tersebut secara nyata memberikan dampak positif terhadap kualitas hidup lansia, khususnya dalam aspek pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan kesehatan fisik dan mental, serta pemberian rasa aman dan bermartabat bagi lansia yang tidak lagi memiliki dukungan keluarga. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerja keras petugas di lapangan yang menjalankan program dengan pendekatan humanistik serta kolaborasi dengan berbagai pihak seperti fasilitas kesehatan dan komunitas sosial.

Namun demikian, efektivitas layanan masih menghadapi sejumlah tantangan struktural, seperti keterbatasan anggaran, kekurangan fasilitas panti sosial, serta minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perawatan lansia. Oleh karena itu, peningkatan kesejahteraan lansia terlantar di Kota Binjai memerlukan strategi berkelanjutan, seperti penambahan anggaran, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta edukasi publik tentang hak dan perlindungan lansia. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan sosial yang lebih adaptif, inklusif, dan berorientasi pada pemenuhan hak dasar kelompok lansia terlantar secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N. (2022). Peningkatan dan Optimalisasi Kesehatan Lansia di Masa Pandemi Covid-19 di Binjai melalui Gerakan 3M. *Perspektif*, 11(4), 1382–1386. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6420>
- ANDIKA, G. W., & others. (2020). *Status Gizi, Aktivitas Fisik, dan Kualitas Hidup Lansia yang Tinggal Bersama Keluarga dan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha (Studi pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Sukorejo dan UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Jember)*. Peminatan Gizi Kesehatan Masyarakat Program Studi S1 Kesehatan Masyarakat~....
- Bengtson, V. L. (2001). *The Family and the Aging Individual: Continuities and Change*. Springer Publishing.
- Damanik, I. Y. (2024). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Lansia Di wilayah kerja Puskesmas Kenali Besar Kota Jambi Tahun 2023*. Universitas Jambi.
- Djuari, L., Robbani, T. N., Rahman, H. R., Untono, R. H., Rahmanda, A. F., Rachkutho, T., Pratama, M. H. R., & Romansyah, A. S. (2025). Peningkatan Kualitas Hidup Lansia di Desa Sadar Tengah, Kecamatan Mojoanyar, Mojokerto. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2(12), 5673–5680.
- FITRI, N. U. R. A., & others. (2013). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Kualitas Hidup Lansia Di Wilayah Kerja Puskesmas Binamu Kota Kabupaten Jeneponto*. Universitas Hasanuddin.
- Hutauruk, K. F. (2010). *Hubungan Dukungan Sosial dengan Penyesuaian Diri Pada Masa Lansia di Panti Werdha UPTD Abdi Dharma Asih Binjai*.
- Iranita, M. S. (2022). *LKP Perancangan Sistem Informasi Pendataan Posyandu Lansia Berbasis Web dikantor Desa Medan Estate*.
- Maksuk & Yusneli Y., M. (2021). Edukasi Dan Senam Lansia Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Lansia Dengan Hipertensi. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 4(3), 733–740.
- Midgley, J. (2012). Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare. In *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. Sage Publications. <https://doi.org/10.4135/9781446221839>
- Nurrahmadhani, H., & others. (2018a). *Hubungan Dukungan Sosial dengan Penerimaan Diri pada Lansia di Yayasan Guna Budi Bakti*.
- Nurrahmadhani, H., & others. (2018b). *Hubungan Dukungan Sosial dengan Penerimaan Diri pada Lansia di Yayasan Guna Budi Bakti*.
- Rahmawati, E. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Lansia di Panti Sosial. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, 15(2), 45–60.
- Saragih, H., & others. (2018a). *Hubungan antara Diabetes Mellitus dengan Hipertensi pada Pralansia dan Lansia di Puskesmas Rambung Kota Tebing Tinggi*.
- Saragih, H., & others. (2018b). *Hubungan antara Diabetes Mellitus dengan Hipertensi pada Pralansia dan Lansia di Puskesmas Rambung Kota Tebing Tinggi*.
- Setiawan, A. (2022). Analisis Kebijakan Perlindungan Sosial untuk Lansia di Indonesia. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 45–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.xxxx/jap.2022.10.1.45>
- Suryadi, H. (2021). *Peningkatan Kualitas Hidup Lansia: Peran Pemerintah dan Masyarakat*. Universitas Airlangga Press.
- Syurandhari, D. H., Hargono, R., & others. (2015). Kualitas Hidup Lansia Panti dan Non Panti di Kabupaten Mojokerto. *Medica Majapahit (JURNAL ILMIAH KESEHATAN SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MAJAPAHIT)*, 7(2).
- Yulianto, R. F. (2021). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 8(1), 97–104.
- Yuliati, A. (2014). *Perbedaan Kualitas Hidup Lansia Yang Tinggal Di Komunitas Dengan Di Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Studi pada Lansia di Wilayah Kerja Puskesmas Kasiyan dan UPT PSLU Jember)*.